

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
(SKTB) DI SMP NEGERI 1 PALLANGGA**



MAYASARI

Nomor Stambuk : 105640177113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
(SKTB) DI SMP NEGERI 1 PALLANGGA.**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan Oleh:

MAYASARI

Nomor Stambuk : 105640177113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
(SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.

Nama Mahasiswi : Mayasari

Nomor Stambuk : 105640 177113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

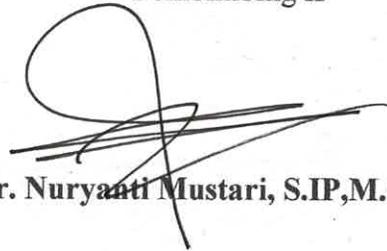
Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan

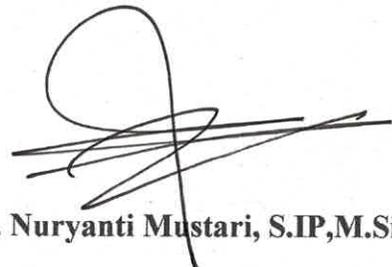
Fisipol unismuh Makassar



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si

ketua Jurusan,

Ilmu pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji undangan Skripsi ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

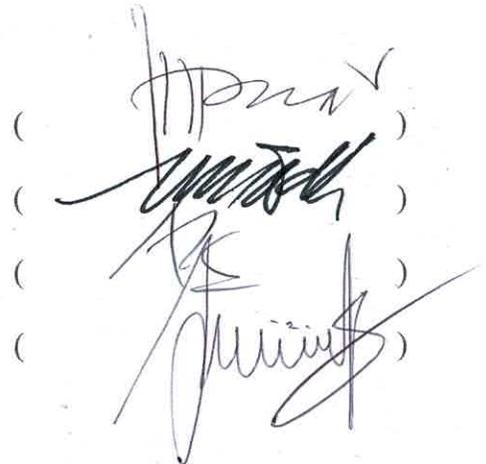
Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
3. Abdul Kadir Adys, SH, MM
4. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mayasari

Nomor Stambuk : 105640177113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 08 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Mayasari

ABSTRAK

MAYASARI 2018. Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) DI SMP Negeri 1 Pallangga. (Di bimbing Oleh Alimuddin Said Dan Nuryanti Mustari).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yaitu: Sekretaris Dinas Pendidikan 1 Orang, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga 1 Orang, Guru SMP Negeri 1 Pallangga 2 orang, dan Siswa SMP Negeri 1 Pallangga 2 orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa: Observasi dan Dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga, dari beberapa indikator yaitu indikator efektivitas, indikator kecukupan, indikator ketetapan, indikator kesamaan, indikator responsivitas sudah dilaksanakan sesuai Visi Misi SMP Negeri 1 Pallangga, sedangkan faktor pendukung dalam evaluasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 pallangga adalah, Pihak sekolah merespon dengan baik program SKTB, Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kesadaran siswa yang masih kurang dan kurangnya pemahaman Guru.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** selaku Pembimbing I dan ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi di kampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa yang telah memberikan data informasi selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Teruntuk yang paling kusayangi kedua orang tua saya yakni H.Tawallah dan Hj. Hasnah yang senantiasa memberikan dukungan moril dan selalu mendoakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada anaknya selama menempuh studi di bangku kuliah.
9. Untuk saudara dan saudari saya yaitu Mia, Uni, Gaffar, Rikho dan Iful yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas B Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

11. Buat teman seangkatan 013 Ilmu Administrasi yaitu Ipha, Hendrawan, Dian dan Puput teman-teman lainnya yang tidak disebut satu persatu memberikan semangat dan menghibur saya selama penulisan skripsi.
12. Buat Kakanda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Unismuh Makassar telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.
13. Buat teman-teman KKP angkatan 13 khususnya Kecamatan Panakkukang yang banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 08 Mei 2018

Mayasari

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Evaluasi	8
B. Kebijakan	10
C. Evaluasi Kebijakan	12
D. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)	21
E. Kerangka Fikir	29
F. Fokus Penilaian	30
G. Deskripsi Fokus Penilaian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga	59
C. Faktor pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dye dalam Nawawi (2009) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dan kebijakan baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan suatu kebijakan harus di evaluasi, untuk mendapat *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dinamika *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum nampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut Mustopadidjaja (2002) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik, oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (valuejudgment) tertentu.

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat *survive* didalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyatannya adalah dewasa ini bangsa indonesia dilanda dan masih berada ditengah-tengah krisis yang menyeluruh. Kita dilanda Olek Krisis Politik, Krisis Ekonomi, Krisis Hukum, Krisis Kebudayaan, dan tidak dapat disangkal juga di dalam bidang Pendidikan. Pendidikan tidak lepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. oleh karena itu fungsi dan peranan pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana. Merespon fakta pendidikan saat ini Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang Pendidikan, salah satu kebijakan program Pendidikan Ichsan Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Bertujuan: 1. Mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar serta dirumuskan dalam nilai, 3. Memberikan pelayanan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pembelajaran yang kondusif, dan 4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan

emosional, intelektual, dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

SKTB merupakan singkatan dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (*Automatic Promotion*), SKTB disosialisasikan pada tahun 2011 dimana pelaksanaannya pada tahun 2012 dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, dan SMP di Kabupaten Gowa. Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, dan SMP di Kabupaten Gowa. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, khusus anak didik di Kabupaten Gowa Kebijakan tersebut ditempuh karena pemerintah daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menyadari bahwa sistem Pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat

mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

SKTB adalah kebijakan program pendidikan yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh. Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk keperluan pribadi dapat hemat. SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Automatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas

bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka Peneliti tertarik mengangkat judul penelitian "*Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 pallangga.
2. Faktor-faktor apa yang Menghambat dan Mendukung Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini maka tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 1 Pallangga.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 1 Pallangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya Evaluasi Kebijakan SKTB dan sebagai salah satu bahan bacaan yang berharga bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai Evaluasi Kebijakan SKTB dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pendidikan khususnya Evaluasi Kebijakan SKTB Di SMP Negeri 1 Pallangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi

1. Pengertian evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *Evaluation* dalam istilah Indonesia menjadi evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu, untuk mendapatkan evaluasi yang meyakinkan. Menurut Nugroho (2004) Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Menurut Agustino (2006) Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapat dan mengkomunikasikan suatu informasi dan petunjuk bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Evaluasi (*evaluation*) meliputi bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan tersebut, siapa yang mengevaluasi kebijakan dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. Menurut Lester dan Steward (2000:126) dalam Agustino (2006:185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan dilakukan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1994) dalam Nawawi (2009) yaitu:

- a. Evaluasi semu yang dimaksud adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.
- b. Evaluasi formal adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai-nilai dari program dan kebijakan.
- c. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasi

1. Relevansi : Harus mampu memberikan informasi yang tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, mampu menjawab secara benar pertanyaan dalam waktu yang tepat.
2. Signifikan : Harus mampu memberikan informasi yang baru dan penting.
3. Validitas : Mampu memberikan pertimbangan yang tepat sesuai dengan hasil nyata/data empirik mengenai hasil kebijakan.
4. Reliabilitas : Dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yang teliti.
5. Obyektif : Tidak memihak/bias.
6. Tepat waktu.
7. Daya guna : Hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakan.
- 8.

B. Kebijakan

Kata kebijakan Menurut Ndara (2003) bahwa kebijakan berasal dari terjemah kata *policy* yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Bernadus luankali berpendapat bahwa kebijakan adalah ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Robert Eyestone (Agustino Leo, 2012:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar scholar yang mempelajarinya. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (Agustino Leo, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sebagaimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) sebagaimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian

dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari defenisi kebijakan.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

C. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan perkiraan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih dimata masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah. Menurut Mustopadidjaja (2002) Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*valuejudgment*) tertentu.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bisa dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi mencakup lima evaluasi sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang di harapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Kecukupan (*adequacy*)berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
3. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajiban untuk mendistribusikan *resources* dalam masyarakat.
4. Responsivitas (*responsiveness*)berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

5. Ketetapan (*apporopriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria secara bersama-sama. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

a) Tipe evaluasi kebijakan

Menurut James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam

ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap:

1. Pencapaian target (*output*)
2. Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*)
3. Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian
4. Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
5. Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

b) Tujuan evaluasi kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan menurut Subarsono(2005) yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur beberapa besar dan kualitas pengeluaran (*output*) dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak dari suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik.

c) Tahapan evaluasi kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan publik menurut subarsono(2005).

1. Spesifikasi adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau kebijakan tertentu. Spesifikasi adalah merupakan cara dimana manfaat harus dinilai atau dipertimbangkan.
2. Pengukuran(*measurement*) secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan.
3. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan.
4. Rekomendasi, merupakan suatu penentuan apa yang seharusnya dilakukan

d) Hambatan evaluasi kebijakan.

Berbeda dengan tahapan proses kebijakan publik yang lain relatif mendapat banyak perhatian, maka tahap evaluasi kebijakan sering kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan implementator maupun stakeholder yang lain. Suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berikut ini diidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam melakukan evaluasi kebijakan.

1. Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier mereka. Banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan atau tidak.
2. Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahannya dari implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.
3. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial.
4. Kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada masalah baik tersedianya cukup data dan informasi yang *up to date*, disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada suatu

instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.

e) Dimensi evaluasi kebijakan

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi kebijakan publik. Dimensi tersebut adalah:

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Darinya kita akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas dan efisiensi, dan sebagainya yang terkait.
2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Sehingga kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (*outcome*) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya(kesesuaian antara sarana dan tujuan).

Menurut Palumbo, dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus didalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, saat implementasi, hingga saat selesai implementasi kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi:

1. Evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini, Menurut Palumbo diperlukan dua kali evaluasi. Pertama, evaluasi desain kebijakan, untuk menilai apakah alternatif-alternatif

yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*, dan lain-lain yang bersifat rasional dan terukur. kedua, evaluasi legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakholder/kelompok sasaran yang dituju kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (*pooling*), survey, dll.

2. Evaluasi formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan.
3. Evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

f) Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut karena penyebab yang lain.
 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
- g) Manfaat evaluasi kebijakan

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.
2. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
3. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
4. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

1. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
2. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

h) Bentuk rekomendasi Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan akhir siklus kebijakan yang berada pada tahap evaluasi kebijakan, hasilnya:

1. Kebijakan dilanjutkan (*continuation*)
2. Perubahan atau perbaikan kebijakan (*change or alteration*)
3. Pencabutan kebijakan (*termination*)

D. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) .

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan atau yang disingkat (SKTB) adalah proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kualitas kemampuan yang dipersyaratkan kurikulum.

Secara operasional, SKTB diartikan bahwa setiap peserta didik:

1. Tuntas mencapai kualitas suatu mata pelajaran sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam kompetensi Kelas Minimal (KKM).
2. Tuntas menyelesaikan pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS yang dinyatakan dalam kurikulum.

3. Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang diikuti.
4. Berkelanjutan mengikuti pelajaran (kompetensi) pada kelas berikutnya walaupun pada akhir pelajaran (semester/tahun), masih ada kompetensi dasar yang belum dituntaskan (belum memenuhi KKM) pada mata pelajaran tertentu.
5. Peserta didik tidak tinggal kelas dan tidak mengulang seluruh mata pelajaran dikelas tertentu, namun wajib menuntaskan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu yang belum memenuhi KKB pada saat berada/duduk dikelas berikutnya.
6. Berkelanjutan meneruskan pendidikannya (SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA, SMK,MAK) ke jenjang pendidikan berikutnya dengan menuntaskan semua tagihan standar kompetensi pada setiap mata pelajaran kelas terakhir.

Secara teknis, penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan penguasaan seluruh indikator untuk suatu kompetensi dasar (KD) yang dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau diatas nilai KKM. Apabila nilai yang diperolehnya sama atau diatas nilai KKM bagi suatu standar kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan pembelajarannya ke standar kompetensi berikutnya. Apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata pelajaran dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke semester berikutnya.

- a. Tujuan pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan

Sistem pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan bertujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi dan Kompetensi Dasar serta dirumuskan dalam Nilai Kompetensi Kelas Minimal.
2. Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar berikutnya tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas.
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spritual, kecerdasan emosional (intrapersonal), kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial (interpersonal), kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestik). Untuk pembentukan kepribadian bermoral, sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
5. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

b. Manfaat kelas tuntas berkelanjutan

Sistem pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan memiliki beberapa keunggulan dan manfaat dibandingkan pendekatan yang berlaku dialam sistem yang umumnya dilakukan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Peserta didik lebih ditantang untuk belajar mencapai standar kompetensi yang dinyatakan dalam KKM.
 2. Kualitas hasil belajar peserta didik lebih baik dan lebih tinggi serta terjamin oleh sekolah karena tidak ada peserta didik yang berkualitas di bawah KKM.
 3. Peserta didik lebih bertanggungjawab atas beban belajar yang menjadi tanggungjawab karena mereka harus mencapai kualitas minimal yang dinyatakan dalam KKM dan sikap bertanggungjawab menjadi sikap dirinya.
 4. Dengan pencapaian kualitas hasil belajar pada tingkat KKM dan di atasnya, pada akhir tahun tidak ada peserta didik yang tinggal kelas karena mereka memenuhi persyaratan kenaikan kelas.
 5. Dengan sistem kredit semester yang menjadi bagian terintegrasi dari Kelas Tuntas Berkelanjutan, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyelesaikan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk pribadi dapat dihemat.
- c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan berpijak pada Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum dikembangkan sekolah (KTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 dan 23 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Satuan pendidikan mengembangkan KTSP sesuai dengan struktur kurikulum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi.

Standar isi (SI) memuat standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berisikan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan KD dan SK guru mengembangkan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

KTSP adalah kurikulum berdasarkan kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, proses pendidikan adalah upaya bersama antara guru dan peserta didik dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam KKM. Pencapaian kompetensi yang dinyatakan dalam KKM adalah karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi yang ingin direalisasikan melalui Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan KTB adalah strategi yang dinilai memiliki tingkat keberhasilan realisasi ide yang diinginkan kurikulum. Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan khususnya Kompetensi Kelas Minimal menjadi patokan untuk menyatakan bahwa kurikulum telah dilaksanakan pada jenjang kesuksesan implementasi yang tinggi dan peserta didik telah memiliki kualitas yang diinginkan kurikulum.

d. Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mengenal sistem kredit semester dan satuan kredit semester. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri

beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Penyelesaian pembelajaran atau ketuntasan belajar dalam satu semester diukur dari jumlah kredit yang berhasil dikumpulkan peserta didik berdasarkan beban belajar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006.

Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi jam pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri takterstruktur. Satuan kredit semester tatap muka adalah 45 menit untuk SMP/MTS dan 45 menit untuk SMA/MA, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan tidak terstruktur. Jumlah beban belajar dari keseluruhan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan tidak boleh melebihi 32 sks untuk SMP/MTS, 38/39 sks untuk SMA/MA.

Prinsip yang harus dicermati di dalam Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) didalam sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah (1) peserta didik menentukan sendiri beban belajar diatas beban minimal (2) peserta didik menentukan sendiri mata pelajaran pilihan yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (3) peserta didik yang berkampuan dan berkemajuan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

e. Landasan Yuridis Kelas Tuntas berkelanjutan

Sistem pembelajran Kelas Tuntas berkelanjutan didasarkan pada:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
2. Undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan provinsi.

f. Landasan pedagogik Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan didasarkan pada landasan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas/lompetensi yang diharapkan masyarakat/bangsa.

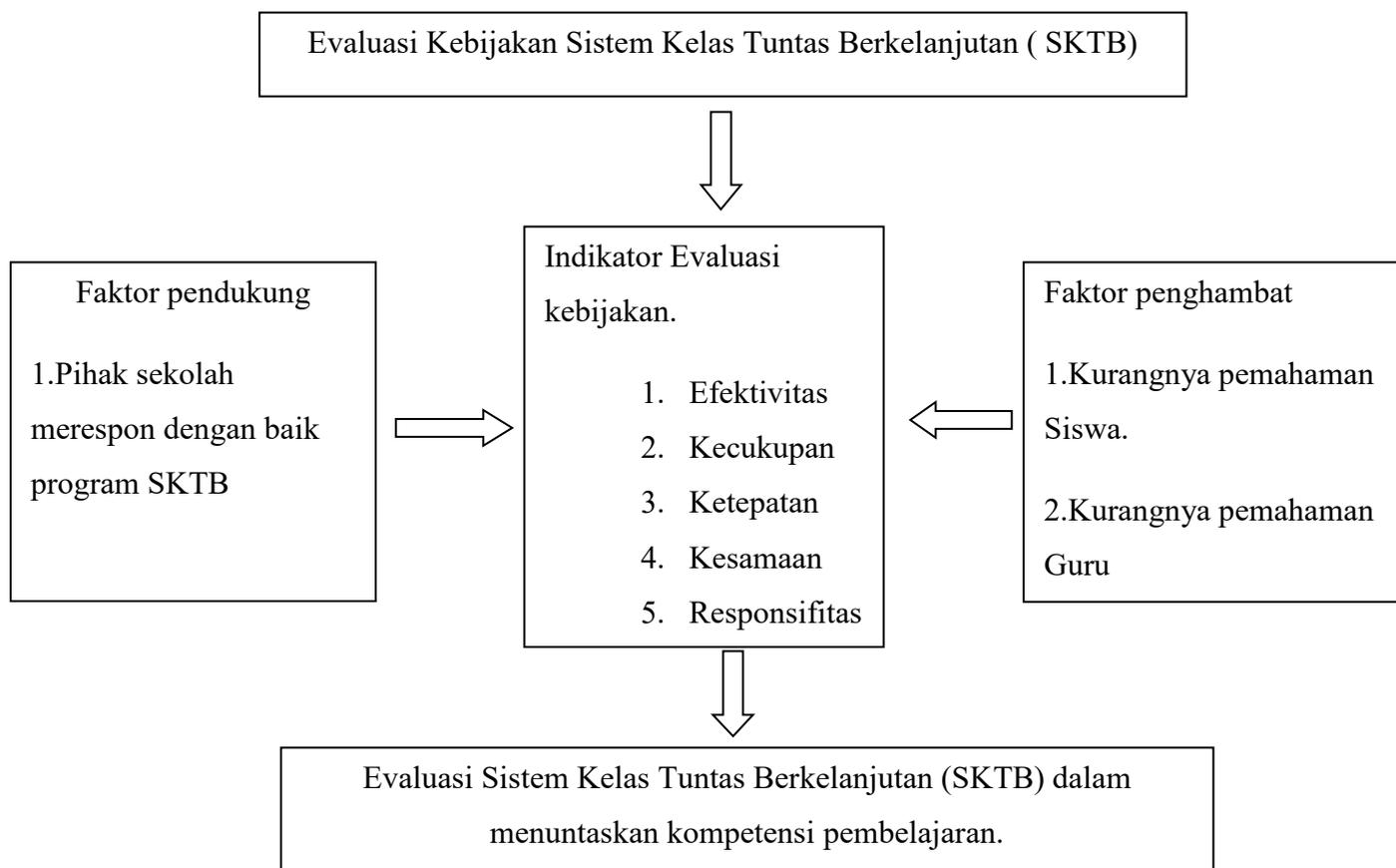
2. Kualitas yang diinginkan bangsa terumus dalam tujuan pendidikan nasional yaitu manusia beriman dan bertawa kepada tuhan yang maha esa, berakhlq muia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Kualitas belajar peserta didik yang dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dikembangkan dari proses pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar 9 Tahun sebagai kualitas dasar manusia Indonesia dan lanjutan pada Pendidikan Menengah 3 tahun.
4. Kualitas hasil belajar dalam pengetahuan yang dinyatakan dalam Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang selalu dapat diperbaiki dan ditingkatkan setiap saat baik pada waktu oleh peserta didik, baik pada pada kelas yang dihadapi dikelas sesudahnya.
5. Kualitas hasil belajar yang terkait dengan kemampuan, nilai dan kebiasaan hanya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dari kelas 1 (SD/MI) sampai minimal sampai tuntas wajib belajar 9 tahun.
6. Peserta didik adalah subyek dalam belajar sehingga proses pendidikan harus menempatkan kepentingan belajar peserta didik sebagai yang utama.
7. Sesuai dengan prinsip pendidikan, pengukuran hasil belajar dilakukan untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik pada satu titik wajtu sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kesulitan yang dihadapi.
8. Kurikulum adalah kurikulum sekolah di setiap jenjang pendidikan, bukan kurikulum kelas.

9. Pembelajaran adalah proses realisasi dari rencana pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan.

E. Kerangka Fikir

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah terlaksananya kebijakan tersebut. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek, dan jangka panjang. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, sehingga dapat dinilai untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dengan demikian, evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai dengan dampak yang diinginkan.

Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) adalah sebuah kebijakan program pendidikan yang dimana bertujuan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal kepada peserta didik agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua kompetensi pada seluruh mata pelajaran disetiap satuan pendidikan dan program ini mengenal sistem yang tidak mengenal tinggal kelas. Untuk dapat melaksanakan program ini diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak yang terkait lainnya sehingga efektifitas dari kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat, khususnya untuk peserta didik.



F. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka fikir diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu: (1) efektifitas (2) kecukupan (3) ketetapan (4) kesamaan (5) responsivitas beserta Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 1 Pallangga.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Efektifitas (*effectivenss*) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang di harapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, patut untuk di ukur, sejauhmana tingkat efektifitas kebijakan tersebut, agar secara

bersamaan tidak terjadi kerugian dalam melaksanakan program, perlu ada ukuran agar tujuan tercapai dengan tepat dan dapat menyusun perencanaan yang baik untuk hasil yang lebih berkualitas.

2. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dicapai apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
3. Ketetapan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria secara bersama-sama. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajiban untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat.

5. Responsifitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi pendorong suatu rangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
7. Faktor penghambat adalah suatu keadaan dimana terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan.
8. Evaluasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) dalam menuntaskan kompetensi pembelajaran. SKTB memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Penelitian kurang lebih 2 bulan dimulaipadatanggal 21 oktober-21 desember 2017. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan Topik yang diteliti mengenai Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 1 pallangga. Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Dan SMP Negeri 1 Pallangga dengan dasar pertimbangan karena pelaksana dari Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penilaian kualitatif. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta dilapangan. Selain itu landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, khususnya Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan data sekunder.

1. Data primer, Adalah data yang dibuat oleh penelitian untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumentasi, laporan-laporan, dan informasi data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Studi keputusan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan (jurnal), kerangka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 - b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dalam penelitian kualitatif hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat karena penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Di SMP Negeri 1 Pallangga maka penulis memutuskan informan kunci paling tepat adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Wakil Kepala sekolah SMP Negeri 1 Pallangga, Guru, Siswa. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	Andi Budiman,SE,MM	Sekretaris Dinas Pendidikan	AB	1 Orang
2.	Drs.H. Usman	Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga	US	1 orang
3.	Lisdana,S.Pd	Guru	LD	1 orang
4.	Nursyamsih,S.Pd	Guru	NS	1 orang
5.	Muh. Nur Ikhsan	Siswa	NI	1 orang
6.	Audya	Siswi	AU	1 orang
	Jumlah			6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2013:130) teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti.
2. Wawancara, dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Dokumentasi, dimana peneliti mendapatkan data-data melalui dokumen yang berupa notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah dan lain-lain. Selain bentuk dokumen, bentuk lainnya untuk mendapatkan data-data adalah foto yang dapat mengungkap suatu situasi pada waktu tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisa data model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian Data, sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan, dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam

penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan ,Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur , 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto,dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90km. di Kabupaten Gowa terdapat 18 wilayah kecamatan dan 168 desa/kelurahan.

b. Letak Demografi

Berdasarkan Gowa dalam angka tahun 2014, penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 691.309 jiwa. Di Sulawesi Selatan, Gowa menempati urutan ketiga kabupaten terbesar jumlah penduduknya setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa (2014) Kecamatan Tombolopao merupakan kecamatan terluas dengan wilayah yakni 251,82 Km² dengan jumlah penduduk 28.454 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Somba Opu dengan jumlah penduduk 137.942 jiwa sedangkan yang paling rendah penduduknya adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk 13.859 jiwa. Selanjutnya dapat kita lihat sesuai tabel berikut. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Gowa tahun 2013 :

Tabel 4.1 jumlah penduduk abupaten Gowa.

No	Kecamatan	Jenis kelamin		jumlah
		L	P	
1	Bontonompo	19,924	21,680	41,604
2	Bontonompo Sel	14,429	15,716	30,145
3	Bajeng	32,574	33,423	65,997
4	Bajeng barat	11,834	12,431	24,265
5	Pallangga	51,530	52,993	104,523
6	Barombong	18,031	18,524	36,555
7.	Somba opu	68,398	69,544	137,942
8	Bontomarannu	16,401	16,685	33,086
9	Pattallassang	11,515	11,651	23,166
10	Parang loe	8,571	8,8967	17,538
11	Manuju	7,248	7,673	14,921
12	Tinggimoncong	11,637	11,801	23,438
13	Tombolo pao	14,445	14,009	28,454
14	Parigi	6,585	7,274	13,859
15	Bungaya	8,142	8,636	16,778
16	Bontolempangan	6,768	7,348	14,116
17	Tompobulu	14,817	15,857	30,674
18	Biring bulu	16,726	17,522	34,248
	Jumlah	339,575	351,522	691,309

2. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Visi Dan Misi Dinas Pendidikan:

Visi:

“ Terselenggaranya layanan pendidikan yang prima untuk membentuk manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Gowa sebagai kabupaten pendidikan”

Misi:

1. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau
2. Meningkatkan profesionalitas dan Akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
3. Menyediakan layanan kepemudaan yang merata.
4. Menyediakan layanan cabang olahraga yang merata.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.

3. Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dinas pendidikan kabupaten Gowa berlokasi di Kabupaten Gowa dengan data sebagai berikut:

Nama: Dinas Pendidikan kabupaten Gowa

Alamat: Jl. Mesjid Raya No. 30 sungguminasa

Fax: 0411-887344

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa



4. Data Kepegawaian

Data kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

A. Jabatan

1. Jabatan Eselon II	= 1 Orang
2. Jabatan Eselon III	= 5 Orang
3. Jabatan Eselon IV	= 15 Orang
4. Staf	= 50 Orang
Jumlah	= 71 Orang

B. Golongan

1. Golongan II	= 6 Orang
----------------	-----------

2. Golongan III	= 51 Orang
3. Golongan IV	= 14 Orang
Jumlah	= 71 Orang

5. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebanyak 167 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Pegawai Kantor Dinas	71 Orang
Penilik PLS	24 Orang
Kepala UPTD Dinas Pendidikan	19 Orang
Pengawas SD, SMP,SMA dan SMK	53 Orang
Jumlah	167 Orang

6. Jumlah Guru

Jumlah guru berstatus PNS dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Sebanyak 5.340 orang yang terdiri dari:

Tabel 4.3 Jumlah Guru

Jenjang Sekolah	PNS
TK	169
SD	2,853
MI	112
SMP	1,200
MTS	85

SMA	491
SMK	345
SLB	40
MA	45
Jumlah	5,340

7. Data Sekolah

Jumlah sekolah yang berada pada wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebanyak 1.020 sekolah terdiri dari:

Tabel 4.4 Data Sekolah

Jenjang sekolah	Negeri	Swasta	Total
TK	23	243	266
SD	399	12	411
SDLB	1	4	5
MI	1	79	80
SMP	81	23	104
MTs	1	62	63
SMA	21	20	41
SMK	5	10	15
MA	1	34	25
Jumlah	533	487	1,020

8. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan, kabupaten Gowa mempunyai susunan organisasi :

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretaris :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendidikan Dasar :
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Menengah :
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan Menengah
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah :
 - 1. Seksi Pendidikan Non Formal
 - 2. Seksi Pendidikan Prasekolah
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Prasekolah
- f. Bidang Olahraga dan Pemuda

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan
2. Seksi Pengembangan Olahraga
3. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Kepala Dinas:

1. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas :
 - b. Penyusunan Rencana Strategi Dinas ;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pelayanan pendidikan dan dinas pemuda dan olahraga:

- d. Pembuatan pengkoordinasikan, pengendalian pengawasan program dan kegiatan dinas.
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
- a. Merumuskan rencana strategik dan program kerjadinan yang sesuai dengan visi dan misi daerah ;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerjadinan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja dinas ;
 - d. Membina dan mengembangkan karier pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan pemerintahan daerah.
 - e. Mengarahkan dan merumuskan program kerja dinas dan menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan Provinsi.
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
 - g. Membina pelaksanaan program waskat dilingkungan dinas .
 - h. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan .
 - i. Membina pelaksanaan tugas- tugas unit pelaksana teknis, pengawas dan penilik luar sekolah .

- j. Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan dinas.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan pelaporan
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan pelaporan:
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian:
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.
3. Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di Bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

- b. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian:
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan laporan.
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan.
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup dinas.
- j. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretariat terdiri dari.

9. Profil SMP Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa

a. Lokasi Smp Negeri 1 pallangga

SMP Negeri 1 Pallangga berlokasi di Kabupaten Gowa dengan data sebagai berikut:

Nama	SMP Negeri 1 pallangga
Alamat	Jl. Pembangunan No.3 Pallangga,Mangalli,kec.pallangga,Kab.Gowa Prov.Sulawesi Selatan
Telepon	0411 842916
Email	@smpn1pallangga.sch.id

SMP Negeri 1 Pallangga berdomisil di Jl. Pembangunan No.3, yang secara geografis terletak didaerah strategis yang berudara cukup sejuk tepatnya dikelurahan mangalli, Kecamatan Pallangga yang dapat dijangkau dari ibu kota kabipaten ke arah selatan yang berjarak 3 KM dari ibu Kota Kabupaten Gowa dengan menggunakan alat transportasi kendaraan dan akses jalan yang cukup lancar sehingga memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh sebab itu perlu dilaksnakan analisis SWOT sebagai berikut:

1.Kekuatan Smp Negeri 1 Pallangga

- a. Sekolah berada pada posisi yang sangat strategis karena terletak dipusat kota Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- b. Jumlah tenaga pendidik yang memadai, yaitu 106 orang yang terdiri dari 63 PNS dan 45 GTT serta beberapa orang guru penambah jam.

- c. Jumlah siswa 1846 orang yang dibagi dalam 48 rombongan belajar.
 - d. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik adalah S1 98 orang dan S2 8 orang.
 - e. Tenaga Administrasi 13 Orang terdiri dari 10 orang PNS dan 3 orang honorer.
 - f. Pustakawan 2 orang terdiri dari 1 orang PNS dan 1 orang honorer
 - g. Penjaga sekolah 3 orang.
 - h. Ruang laboratorium Biologi, fisika yang memadai.
 - i. Laboratorium computer 1 unit.
 - j. Laboratorium bahasa 1 unit
 - k. Lapangan olahraga yang memadai.
 - l. Ruang pustakawan yang menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran yang memadai.
 - m. Ruang punggawa Demba.
 - n. Mushollah sekolah.
 - o. Kantin kejujuran yang luas dan bersih.
 - p. Lahan sekolah yang luas yaitu + 2 Ha.
 - q. Tempat parkir yang luas.
 - r. Dekat dengan stadion Kalegowa.
 - s. Imput peserta didik relatif baik.
2. Kelemahan Smp Negeri 1 Pallangga
- a. Jumlah ruang kelas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar.

- b. Kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan belum maksimal.
- c. Tupoksi belum maksimal.
- d. Masyarakat terdapat anak pekerja pada usia sekolah.
- e. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi sebagian orang tua siswa masih rendah.

3. Peluang Smp Negeri 1 Pallangga.

- a. Perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan digratiskannya biaya pendidikan untuk anak usia belajar mulai dari tingkatan SD/MI sampai SMA/SMK.
- b. Diberlakukannya perda No 10 tahun 2013 tentang penerapan Sistem belajar tuntas melalui program *Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*.
- c. Ditetapkan sebagai salah satu sekolah sasaran Implementasi Kurikulum 2013 mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- d. Sekolah sebagai salah satu sekolah pengembangan program kemitraan Indonesia dan Australia dengan sasaran pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah (PKB-KS) tahun 2014.
- e. Komitmen masyarakat sekolah untuk mengembangkan manajemen sekolah yang partisipasif.

4. Ancaman Smp Negeri 1 Pallangga

- a. Posisi rumah warga masyarakat terlalu berdekatan dengan sekolah.
- b. Arus lalu lintas yang sering macet.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar sekolah dalam membantu menjaga dan memelihara keamanan sekolah.

Berdasarkan analisis kondisi sekolah tersebut, Smp Negeri 1 Pallangga menyusun kurikulum 2013 untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar.

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memahami dan menghayati, serta mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.
2. Meningkatkan pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik secara optimal dengan tingkat perkembangannya.
3. Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan potensi fisik dan membudayakan sportivitas serta kesadaran hidup bersih dan sehat.

b. Sejarah Smp Negeri 1 Pallangga

Smp Negeri 1 Pallangga mengalami perkembangan pesat baik dalam jumlah rombongan belajar maupun jumlah bangunan /ruang kelas. Awal Smp Negeri 1 pallangga hanya berdiri dari 10 rombongan kelas pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh Tokoh Pendidikan di Kecamatan Pallangga, yakni Bapak Almarhum Bakka Dg. Tobo (Mantan ketua BP3) dan Bapak Siama Dg.Leo (wakil ketua BP3). Berdirinya Smp Negeri 1 pallangga dilatarbelakangi oleh

tuntutan kebutuhan pendidikan yang sangat mendesak oleh warga. Oleh karena itu sekolah ini terus berbenah diri mengembangkan jumlah kelas dan mengembangkan prestasi sekolah, prestasi peserta didik dan guru serta kepala sekolah.

c. Visi Misi Smp Negeri 1 Pallangga

VISI: Terdepan Dalam Prestasi, Berimrahaq, Beripteks Dan Peduli Lingkungan

MISI:

1. Mewujudkan pembelajaran berkualitas yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang professional, sarana prasarana yang lengkap dan pemanfaatan teknologi informatika.
2. Membentuk perilaku peserta didik yang berkarakter, terampil, santun, beriman dan bertaqwa.
3. Menggiatkan kegiatan pembinaan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler.
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kepedulian yang tinggi dalam hal lingkungan hidup sehingga mampu menjaga, mengelola dan melestarikan serta berupaya mencegah pencemaran lingkungan hidup yang diawali didalam.
5. lingkungan sekolah.

Indikator :

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas melalui pendekatan saintifik.
2. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, terampil, santun, beribadah dan bertaqwa.
3. Mewujudkan peserta didik yang kompetitif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
4. Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, nyaman, hijau, dan sehat.
6. Mewujudkan semangat dan komitmen warga sekolah untuk mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif.

Tujuan sekolah:

Tujuan Pendidikan Smp Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa

1. Menghasilkan peserta didik yang memiliki keunggulan dan kemampuan yang optimal dalam bidang pengetahuan dan keterampilan serta memiliki jiwa kompetitif dalam berbagai disiplin ilmu.
2. Menghasilkan peserta didik yang mampu mengaktualisasi nilai-nilai akhlakul qarimah dan imtaq terhadap dirinya, masyarakat dan lingkungannya.

3. Menghasilkan peserta didik yang responsif dan bertanggung jawab terhadap situasi, kondisi lingkungan sosialnya, serta keajuan teknologi dan informasi.
4. Menghasilkan peserta didik yang peduli terhadap upaya mengelola, menjaga, mengembangkan, dan melestarikan lingkungan sehingga dapat terwujud “SNEPAL GO *green Toward Environment*” .
5. Mewujudkan peserta didik dan kependidikan yang sehat, cerdas, kreatif, dan inovatif, melalui kegiatan MGMP tingkat sekolah dan Kabupaten Gowa, Diklat profesi, Work Shop, Seminar, dan dapat mengembangkan diri.
6. Menjadi lembaga pendidikan yang memberikan layanan berkualitas melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

B. Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah kebijakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar kelas.

Untuk mengetahui bahwa sebuah kebijakan itu berhasil atau tidak diperlukan evaluasi kebijakan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui suatu kebijakan sesuai dengan dampak yang diinginkan. Untuk menilai suatu keberhasilan kebijakan perlu adanya beberapa indikator menjadi penunjang dari program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga diantaranya. Beberapa karakteristik Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn (1994) . Untuk mengetahui tahap yang dapat dijalankan suatu Evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Tercapainya hasil serta tujuan evaluasi kebijakan program yang telah disusun dan telah dilaksanakan. Dan menurut Hidayat (2003) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Sebagaimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya yang dilihat adalah (kinerjanya).

Efektifitas berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, patut untuk diukur, sejauhmana tingkat efektivitas kebijakan tersebut, agar secara bersamaan tidak terjadi kerugian dalam melaksanakan program, perlu ada ukuran agar tujuan tercapai dengan tepat dan dapat menyusun perencanaan yang baik untuk hasil yang lebih berkualitas.

NO	Tujuan SKTB	Program yang terlaksana
1	Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi dasar serta dirumuskan dalam nilai kompetensi kelas minimal (KKM).	Peserta didik menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi dasar serta dirumuskan dalam nilai kompetensi kelas minimal mis: peserta didik yang telah mencapai KKM 75 atau di atasnya diartikan sebagai mereka yang mencapai ketuntasan (KKM).
2	Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran disetiap kurikulum satuan pendidikan.	Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran disetiap kurikulum satuan pendidikan.
3	Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar berikutnya	Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum

	tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas.	waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar berikutnya tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas
4	Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spritual, kecerdasan emosional (intrapersonal), kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial (interpersonal), kecerdasan berbahasa, kecerdasan musikal, dan kecerdasan kinestik) untuk pembentukan kepribadian bermoral, sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.	Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan berbahasa, kecerdasan musikal) untuk kepribadian yang bermoral sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
5	Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.	Tidak terlaksana

Dilihat dari tabel diatas maka peneliti mewawancarai salah satu Sekretaris

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“Dalam Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) apa yang ingin dicapai sebenarnya sudah dilaksanakan, namun kerjasama antar tim

dibutuhkan dalam mensukseskan program ini, termasuk kerjasama antar dinas dan pihak sekolah”.(wawancara AB 15 November 2017).

Hal tersebut senada yang dinyatakan oleh Wakil kepala sekolah SMP Negeri

1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Dalam program SKTB ini tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai dari 5 tujuan ada 4 tujuan yang telah tercapai dan 1 tujuan tidak tercapai yaitu: meningkatkan keprofesian dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan Global”.(wawancara US 16 November 2017).

Sama halnya yang dikatakan oleh Salah Satu Siswa SMP Negeri 1

Pallangga mengatakan bahwa:

“Dalam program ini apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan sebab saya selaku peserta didik (siswa) menginginkan bantuan agar program SKTB berjalan secara maksimal dan pihak sekolah juga tidak memperhatikan dengan baik dan hanya mempercayakan kepada guru padahal kerjanya belum maksimal”(wawancara NI 16 November 2017).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh salah satu Siswi SMP Negeri 1

Pallangga mengatakan bahwa:

“Saya selaku peserta didik (siswi) berharap agar program yang dikeluarkan pemerintah tetap dilaksanakan dengan sesuai harapan, sebab program SKTB memberikan pendidikan secara maksimal kepada peserta didik, dimana kami peserta didik tidak ada lagi yang tinggal kelas, namun dengan syarat jika kami belum menuntaskan mata pelajaran kami diberikan kesempatan untuk remedial sampai mata pelajaran tersebut tuntas”.(wawancara AU 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) susah tercapai akan tetapi masih ada 1 tujuan program yang belum tercapai yaitu meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai

berdasarkan standar nasional dan global tidak tercapai sesuai dengan harapan karena kinerja Dinas maupun pihak sekolah yang ingin dicapai belum terpenuhi dengan baik, karena Dinas juga menginginkan agar program SKTB ini berjalan sesuai dengan harapan.

2. Kecukupan (*adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dicapai apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Proses pencapaian program yang dinilai cukup dan memadai disetiap kalangan (siswa). Pelaksanaan program SKTB dapat dinilai berdasarkan dari data proses pencapaian program SKTB. Program SKTB diharapkan dapat mencapai target sesuai dengan harapan pemerintah dari program SKTB.

SKTB ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011. Sebagai langkah awal pada tahun 2012 SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan untuk tingkatan SD, dan SMP dikabupaten Gowa. Adapun sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai percontohan rujukan pelaksanaan SKTB adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah
1	SDN Center Mangalli
2	SDN Limbung Putra
3	SDN Limbung Putri
4	SDI Paccinongang
5	SDN Kalukuang
6	SDI Pa'banggiang
7	SDN Doja
8	SDI Mangasa
9	SDI Sapaya
10	SDI Pattallassang
11	SDI Gentungang
12	SDI Bontosunggu
13	SDN Pare-pare
14	SDC Malino
15	SDI Batangkaluku
16	SDN 2 Malino
17	SDN Paccinongang
18	SDN Bontokamase
19	SDI Lambengi
20	SDI Pa'budukang
21	SDC Mawang

22	SDI Tanakaraeng
23	SDN Centre Malakaji
24	SDI Tetebatu
25	SDI Biringkaloro
26	SDI Bontokarampuang
27	SDI Panggentungang Selatan
28	SDI Pakatto
29	SDI Mannuruki
30	SDN Bontonompo
31	SDN Bontomanai Unggulan
32	SMPN 1 Sungguminasa
33	SMPN 2 Sungguminasa
34	SMPN 3 Sungguminasa
35	SMPN 1 Tinggimoncong
36	SMPN 1 Bontomarannu
37	SMPN 1 Parangloe
38	SMPN 4 Sungguminasa
39	SMPN 1 Bajeng Barat
40	SMPN 1 Bajeng
41	SMPN 1 Pallangga
42	SMPN 1 Tompobulu
43	SMPN 1 Tombolopao

Tabel diatas menunjukkan pelaksanaan SKTB yaitu di 43 Sekolah yang dijadikan sebagai rujukan SKTB. Pada tahun 2013 sistem ini benar-benar dijalankan diseluruh tingkatan sekolah Dasar hingga menengah Pertama di Kabupaten Gowa tanpa terkecuali baik sekolah Negeri maupun swasta.

Dilihat dari tabel diatas maka peneliti mewawancarai salah satu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan masih terus dikembangkan agar program ini mampu menyentuh setiap kalangan peserta didik (siswa), sehingga program ini diketahui oleh setiap kalangan. Sosialisasi dari Dinas terus ditingkatkan untuk perkembangan dan kemajuan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan”.(wawancara AB 15 November 2017)

Berikut hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Program SKTB adalah sebuah program yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa, tetapi kesuksesan program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa melibatkan semua instansi yang terlibat didalamnya, selain itu para guru harus bekerjasama secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan program tersebut, karena tanpa kerja keras dan loyalitas yang maksimal maka program tersebut tidak berjalan secara maksimal”.(hasil wawancara US 16 November 2017)

Berikut hasil wawancara dengan Guru SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa :

“Menurut saya implementasi dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sudah membawa perubahan bagi para peserta didik (siswa) untuk lebih berprestasi, tetapi perlu ada peningkatan yang lebih dari para penanggung jawab sistem kelas tuntas berkelanjutan agar siswa tidak bosan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam artian masih perlu inovasi dan kreasi”.(wawancara LD 16 November 2017)

Seperti hasil wawancara sebelumnya peneliti mewawancarai salah satu siswa SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Saya selaku siswa sangat menghargai setiap program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, tetapi program tersebut harus dikembangkan lebih kreatif lagi agar kami siswa lebih nyaman dalam belajar dan gampang menyerap ilmu yang diberikan pendidik(guru), selain itu kami juga diberi kesempatan yang lebih banyak lagi agar semua ilmu-ilmu yang disampaikan para pendidik(guru) dapat diserap dengan baik”.(wawancara NI 16 November 2017)

Selanjutnya siswa menambahkan

“dalam kata lain setiap program yang diadakan harus sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya mis: SKTB ini harus konsisten dari awal sampai akhir semua penanggungjawab harus bertanggungjawab terhadap apa yang disepakati sebelumnya. agar semua program dapat berjalan dengan baik. Yang lebih lagi setiap pelajaran yang diberikan harus menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dipahami siswa, sehingga kami tidak kesulitan dalam menyerap mata pelajaran”.(wawancara NI 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Dilaksanakan di semua tingkatan sekolah di kabupaten Gowa tepatnya SD maupun SMP, dimana program yang mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan berbahasa), selain itu para stakeholder harus bekerja sama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan harapan pemerintah.

3. Ketetapan (*appropriateness*)

Ketetapan dalam hal ini adalah tepatnya sasaran atau pemberian program secara tepat. Sasaran atau pemberian program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

yang akan dilaksanakan disemua tingkatan sekolah baik SD maupun SMP, karena sebagian sekolah sudah mengetahui apa itu program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan(SKTB).

NO	SEBELUM SKTB	SESUDAH SKTB
1	Ada persyaratan tinggal kelas (3 mata pelajaran) yang tidak tuntas.	Tidak ada peserta didik yang tinggal kelas.
2	Guru berperan dalam memberikan pembelajaran/ bimbingan bagi siswa.	Guru dituntut lebih ekstra perhatian lagi terhadap para siswa dalam memberikan pembelajaran /bimbingan.
3	Pada setiap akhir semester dan tahun peserta didik dinilai pencapaian ketuntasan.	Pada akhir semester dan tahun peserta didik dinilai berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM).
4	Peserta didik yang tidak naik kelas mengulang semua mata pelajaran.	Syarat dengan pembelajaran remedial untuk membantu peserta didik sehingga tidak ada lagi peserta didik yang tinggal kelas.

Kondisi sebelum adanya SKTB dikabupaten Gowa yaitu daerah masih menganut model pendidikan yang berlaku dibanyak daerah yaitu masih mengenal adanya siswa yang tinggal kelas, namun setelah adanya SKTB untuk dikabupaten Gowa tidak mengenal lagi adanya tinggal kelas bagi siswa. Ketika ada pembelajaran yang tuntas pada kelas sebelumnya maka siswa tersebut tidak harus

mengulang semua mata pelajaran pada kelas tersebut melainkan siswa itu naik kelas dan hanya melakukan remedial pada mata pelajaran yang tidak tuntas itu.

Setelah adanya SKTB menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dengan adanya inovasi baru program pendidikan yang dituangkan dalam peraturan daerah No 10 Tahun 2013 tentang SKTB selain itu dengan diberlakukannya SKTB guru lebih bekerja keras lagi karena dituntut untuk lebih perhatian atau lebih peduli lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya. Hal lainnya dengan adanya SKTB peserta didik dapat menempuh pendidikan sesuai dengan waktu yang normal bahkan peserta didik (siswa) dapat melakukan percepatan dalam menempuh pendidikannya. Hal yang memberikan perubahan yang signifikan dengan adanya SKTB yaitu tingkat kelulusan peserta didik (siswa) mencapai 100%.

Adapun tabel SMP Negeri 1 Pallangga sebagai berikut:

NO	Memadai	Tidak memadai
1	Jumlah tenaga pendidiki yang memadai yaitu 106 orang yang terdiri dari 63 PNS dan 45 GTT.	Memadai
2	Jumlah siswa 1846 orang yang dibagi dalam 48 rombongan belajar.	Tidak memadai karena jumlah ruangan kelas yang tersedia tidak sebanding dengan rombongan belajar.
3	Laboratorium biologi.	Memadai
4	Laboratorium komputer.	Memadai
5	Laboratorium bahasa.	Memadai
6	Lapangan olahraga.	Memadai

7	Ruang pustakawan yang menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran.	Memadai
8	Mushollah sekolah.	Memadai
9	Kantin kejujuran yang luas + 2 Ha	Memadai
10	Tempat parkir yang luas.	Memadai

Dilihat dari tabel diatas maka peneliti mewawancarai Salah satu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang Mengatakan bahwa:

“setelah adanya SKTB menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dengan adanya inovasi baru program pendidikan yang dituangkan dalam peratiran daerah No.10 Tahun 2013 Tentang SKTB, selain itu dengan diberlakukannya SKTB guru lebih bekerja keras lagi karena dituntut lebih perhatian atau lebih peduli lagi dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Hal lainnya dengan adanya SKTB peserta didik dapat menempuh pendidikan sesuai dengan waktu yang normal, bahkan peserta didik (siswa) dapat melakukan percepatan dalam menempuh pendidikannya. Hal yang memberikan perubahan yang signifikan dengan adanya SKTB yaitu tingkat kelulusan peserta didik (siswa) mencapai 100%”.(wawancara AB 15 November 2017).

Berikut hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah SMP Negeri 1

Pallangga mengatakan bahwa:

“Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tepat sasaran, dimana program SKTB bertujuan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada peserta didik agar peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan, dimana peserta didik (siswa) tidak tinggal kelas, namun berkelanjutan mengikuti pelajaran (kompetensi) pada kelas berikutnya walaupun pada akhir pembelajaran (semester/tahun) masih ada kompetensi dasar yang belum dituntaskan (belum memenuhi KKM) pada mata pelajaran tertentu”.(wawancara AB 15 November 2017)

Pertanyaan juga datang dari salah satu Guru SMP Negeri 1 Pallangga yang mengatakan bahwa :

“Saya selaku Guru mendukung program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan semaksimal mungkin agar kualitas hasil belajar peserta didik (siswa) lebih baik dan lebih tinggi, serta terjamin oleh sekolah karena tidak ada peserta didik (siswa) yang berkualitas dibawah Kompetensi Kelas Minimal (KKM)”.(wawancara LD 16 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sebelum adanya SKTB dikabupaten Gowa yaitu daerah ini masih menganut model pendidikan yang berlaku dibanyak daerah yaitu masih mengenal adanya peserta didik (siswa) yang tinggal kelas, namun setelah adanya SKTB untuk kabupaten Gowa tidak mengenal lagi adanya tinggal kelas bagi peserta didik (siswa). Ketika ada pembelajaran yang tidak tuntas pada kelas sebelumnya, maka peserta didik (siswa) tersebut tidak harus mengulang semua mata pelajaran pada kelas tersebut, melainkan peserta didik itu naik kelas dan hanya melakukan remedial pada mata pelajaran yang tidak tuntas. Adapun fasilitas sekolah yang menjadi penunjang yaitu jumlah tenaga pendidik yang memadai, jumlah laboratorium yang memadai, lapangan sekolah, ruangan pustakawa ,mushollah, lahan yang memadai dll, selain itu ada juga fasilitas sekolah yang belum memadai yaitu jumlah kelas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar.

4. Kesamaan (equity)

erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam

masyarakat. Kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Guru harus objektif dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik (siswa) yang rajin dan peserta didik (siswa) yang malas (malas bodoh), jadi peran guru lebih ditingkatkan lagi dalam hal penilaian sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara peserta didik (siswa) berprestasi dan tidak berprestasi”.(wawancara US 16 November 2017).

Berbeda dengan yang dikatakann oleh salah satu siwa SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Saya selaku peserta didik (siswa) yang rajin kebijakan program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) ini sangat tidak adil dikarenakan ada peserta didik (siswa) yang malas dan jarang masuk sekolah tetap naik kelas,saya selaku peserta didik yang rajin kurang menerima program kebijakan ini”.(wawancara NI 16 November 2017).

Seperti hasil wawancara sebelumnya peneliti mewawancarai salah satu Guru SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Ada beberapa peserta didik (siswa) merasa bahwa program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini menguntungkan bagi mereka sehingga menyebabkan beberapa diantara peserta didik (siswa) malas datang kesekolah dan kami selaku guru bisa memberikan nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik (siswa)”.(wawancara LD 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa program Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) sangat tidak adil bagi peserta

didik (siswa) karena peserta didik yang malas tetap naik kelas ,tetapi sebagian peserta didik merasa diuntungkan dengan adanya program kebijakan ini, peran guru sangat dibutuhkan dalam memberikan penilaian sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara peserta didik (siswa) berprestasi dan tidak berprestasi (malas).

5. Responsifitas (responsiveness)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Sekretaris Dinas Pendidikan mengatak Gowa mengatakan bahwa :

“Respon sekolah terhadap program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini cukup baik ,akan tetapi selama berjalannya program kebijakan ini masih banyak sekolah sebagai pelaksana program ini belum mampu menerapkan terutama dalam pendekatan strategi pembelajaran yang di bawakan oleh guru dalam memanfaatkan *quantum learning* sebagai salah satu paradigma menarik dalam pembelajaran, serta kurang memperhatikan ketuntasan belajar secara individual”.(wawancara AB 15 November 2017)

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa :

“Respon guru masih jauh dari harapan pemerintah,namun pemerintah masih melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi, akan tetapi faktanya guru masih banya menggunakan proses pembelajaran yang kaku sehingga

peserta didik (siswa) dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai subjek pendidikan masih belum tampak”.(wawancara US 16 November 2017).

Seperti hasil wawancara sebelumnya peneliti mewawancarai salah satu Guru SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa :

“sejauh ini tanggapan kami selaku guru yang terjun langsung dalam pelaksanaan program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) ini untuk mengamati sistem pendidikan yang lebih bagus, namun akan tetapi guru belum banyak memahami betul tujuan dari program kebijakan Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) tersebut”.(wawancara LD 16 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) ini cukup baik akan tetapi selama berjalannya program ini faktanya guru masih banyak menggunakan proses pembelajaran yang kaku sehingga peserta didik (siswa) dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai subjek pendidikan masih belum tampak.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga.

1. Faktor pendukung

a. Pihak sekolah merespon dengan baik program SKTB

Adanya respon dari sekolah baik guru dan siswa dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan Bahwa:

“Sistem ini sangat bagus, dimana peserta didik (siswa) tidak lagi tinggal kelas jadi mereka dapat lulus dengan waktu yang tepat, namun saya selaku Wakil Kepala sekolah mengingatkan kepada siswa saya harus tetap belajar untuk bekal ke jenjang yang lebih tinggi”.(wawancara US 16 November 2017)

Senada yang dikatakan oleh salah satu Guru SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Sistem ini sangat bagus,dimana Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan mengakui adanya keberagaman perbedaan individu, yaitu mengakui adanya peserta didik yang cepat dan lambat dalam memahami pelajaran. Dalam SKTB terdapat pula sistem kredit semester (sks) sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan dalam studinya”.(wawancara dengan LD 16 November 2017)

Wawancara dengan salah satu siswa SMP Negeri 1 Pallangga Mengatakan bahwa:

“Menurut saya sistem ini sudah bagus karena kita sebagai siswa tidak harus mengulang lagi satu tahun, Namun hanya mengulang pelajaran yang tidak tuntas saja.”(wawancara dengan Ni pada tanggal 16 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa:Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) telah mendapat respon yang baik dan telah diterima baik dari guru maupun peserta didik (siswa) itu sendiri, karena apabila ada peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remedial sampai peserta didik mencapai ketuntasan. Sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan dalam studinya.

2. Faktor Penghambat

a. Kesadaran siswa yang masih kurang

Kesadaran siswa yang masih kurang ini merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan SKTB, dimana masih terdapat beberapa peserta didik (siswa) yang memiliki pemikiran bahwa dengan adanya program ini akan menguntungkan mereka walaupun mereka tidak belajar dengan baik, mereka tetap naik kelas. Terdapat juga beberapa peserta didik (siswa) yang malas sehingga inilah yang dapat menghambat pelaksanaan SKTB.

Hal ini dibenarkan guru SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Ada beberapa siswa merasa bahwa program ini menguntungkan bagi mereka sehingga menyebabkan beberapa diantara mereka mulai santai, terkadang guru ini memberikan remedial namun siswa tersebut malas untuk datang kesekolah, hal inilah yang biasanya menjadi kendala kami”(wawancara dengan LD pada tanggal 16 November 2017).

Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu siswa SMP Negeri 1 Pallangga mengatakan bahwa:

“Saya selaku peserta didik (siswa) belum paham tentang program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana kurangnya sosialisasi sehingga tingkat kesadaran dari kami masih kurang”(wawancara NI 16 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah tingkat kesadaran siswa yang masing rendah dalam pelaksanaan SKTB ini, padahal dalam SKTB ini peserta didik sebagai subjek dari kegiatan pendidikan, kemajuan peserta didik sangat bertumpuh dan ditentukan oleh ketekunan dan usaha yang dilakukan secara individual, jadi ketika peserta didik tidak serius

dalam pembelajaran apalagi ketika mereka malas ke sekolah maka hal ini sangat sulit dalam pencapaian keberhasilan SKTB.

b. Kurangnya pemahaman Guru

Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan belum sepenuhnya dipahami/diketahui guru itu sendiri. Maka dari itu baik pihak sekolah maupun dinas yang mengeluarkan program SKTB memberikan sosialisasi kepada guru untuk perkembangan program SKTB tersebut.

Wawancara dengan salah satu Guru SMP Negeri 1 Pallangga Atas Nama LD Megatakan bahwa:

“Saya selaku guru belum memahami sepenuhnya apa itu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, karena kurangnya sosialisasi, sehingga sebagian dari Guru terutama saya belum memahami sepenuhnya dengan program ini, maka dari itu ada yang Pro dan Kontra karena ketidakpahaman mereka terhadap program ini”. (Wawancara dengan Guru LD pada tanggal 16 November 2017).

Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu guru SMP Negeri 1 Pallangga yang mengatakan bahwa:

“Kami masih belum memahami secara menyeluruh mengenai SKTB, yaitu berkaitan pelaksanaan teknisnya dilapangan. Apalagi berkaitan dengan pembagian waktu, dimana dalam SKTB ini siswa betul-betul harus dibimbing apalagi bagi mereka yang remedial, terkadang kami sulit pada saat membagi waktu dimana jam pelajaran juga padat disamping itu diperlurlukan bimbingan yang khusus bagi mereka yang remedial” (wawancara Us 16 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa belum memahami betul tentang Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), dimana kurangnya sosialisasi dan tingkat kesadaran yang rendah dalam

pelaksanaan SKTB yang kurang tidak cuman itu saja yang menjadi faktor penghambat kurangnya respon dari Guru ada yang pro dan kontra, karena ketidakpahaman mereka terhadap program kebijakan Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) padahal penguatan dalam sistem ini terdapat pada prosesnya karena keberhasilan dan kegagalan sistem ini utamanya terletak pada dukungan guru dan pihak sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SMP Negeri 1 Pallangga maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga, dapat disimpulkan bahwa evaluasi sistem kelas tuntas berkelanjutan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari Tingkat kelulusan yang tidak sebanding dengan kualitas siswanya sehingga program SKTB ini belum berjalan secara efektif.
2. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di SMP Negeri 1 Pallangga, antara lain faktor pendukung adalah Pihak sekolah merespon dengan baik program SKTB, sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kesadaran siswa yang masih kurang, kurangnya pemahaman Guru.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulisan berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan koordinasi yang baik antara Guru dan peserta didik (siswa) sehingga program kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Pelaksanaan kebijakan SKTB lebih ditingkatkan pengawasannya selain memberikan kelulusan yang tinggi, namun tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kebijakannya.
3. Guru perlu meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik (siswa) mengenai SKTB, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
4. Program SKTB seharusnya tidak dilaksanakan lagi/dilanjutkan di sekolah baik SD, maupun SMP, karena banyak peserta didik yang masa bodoh (malas saja naik kelas apa lagi kalau rajin).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung. Alfabeta
- Abidin, Said Zainal. 2004. *kebijakan publik.jakarta: pancur siwah*
- AR. Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN.
- Arnol.M, 2013 *Teori evaluasi kebijakan pdf*.
- Anwar,Ilham.2010. *pengembangan bahan ajar.bahan kuliah online direktori UPI.Bandung*
- Bunafit Nugroho. 2004, *php dan Mysql dengan editor Dreamweaver Mx*, Andi, Yogyakarta.
- Buku panduan *SISTEMKELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (Automatic Promotion)*
- Buku *profil SMP Negeri 1 pallangga kabupaten Gowa*.
- Harakan, Ahmad. 2017 “*Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Kelas TuntasBerkelanjutan Di Kabupaten Gowa*”. Dalam *jurnal Vol.6 No.1 tahun 2017*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Harbani, Pasolong.2013.*Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam proses pengambilan keputusan*. Jakarta : Amelia.
- Mustari, Nuriyanti, 2005. *Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera.
- Meiti, Silfitriana. 2016. “ *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di Kabupaten Gowa*. Ilmu pemerintahan, Universitas Hasanuddin.
- Mustari, Nuriyanti, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik. Pemahaman Teoritis, Empiris*. Membumi Publishing.
- Miles, Mattew B dan A.Michael Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nawawi, Ismail. 2009, *Public Policy, Analisis Stategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Perundang-undangan:
- Undang-undang dasar tahun 1945.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 pasal 31 ayat (1) dan (3)
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah tentang urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.
- Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Tentang standar isi pendidikan dasar dan Menengah mengenal Sistem Kredit Semester (SKS) dan Satuan Kredit semester (sks)

RIWAYAT HIDUP



MAYASARI. Lahir di Sungguminasa 23 November 1994, Anak KeLima Dari Pasangan H. Tawallah Dg Tika dan Hj. Hasnah Dg Jinne. Pendidikan Mulai Tahun 2002 di Sekolah Dasar SDN Centre Mangalli dan Lulus Pada Tahun 2007. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di SMP Negeri 1 Pallangga dan Lulus Pada Tahun 2010.

Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Lagi di Sekolah SMA Negeri 1 Pallangga dan Lulus Pada Tahun 2013. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).